



PNS Takut Gunakan Anggaran

■ Ganggu Serapan Dana APBD

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan ketakutan bawahannya untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mereka takut terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Kondisi ini, kata Cornelis, menjadi satu di antara hambatan dalam penyerapan anggaran. "Baru lelang, baru tender yang kalah lapor bah-

” Baru lelang, baru tender yang kalah lapor bahwa diduga ada kecurangan. Lapor ke polisi, jaksa, BPK, BPKP ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apa Tuhan membuat pengaduan juga. ”

CORNELIS

Gubernur Kalbar

wa diduga ada kecurangan. Lapor ke polisi, jaksa, BPK, BPKP ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apa

Tuhan membuat pengaduan juga,” ujar Cornelis dalam rapat terbatas dengan instansi vertikal di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Jumat (28/8) pukul 09.00 WIB.

Cornelis mencontohkan proyek APBN jalan Sosok-Sanggau yang menang tender senang yang kalah tender menggugat. "Saya sudah membayar kiri dan kanan jalan. Yang akan dibangun semua sudah beres, tapi karena laporan ke mana-mana jadi proses terganggu," ucapnya.

Selain itu, jelasnya, Men-

■ Bersambung ke Hal. 15



PNS Takut Gunakan Anggaran

Sambungan Hal. 9

teri PU RI juga tak berani ambil keputusan. Sampai orang tanam pisang, tabur ikan lele di jalan. "Saya dihina macam-macam, proses kurang lebih empat tahun sampai semua sudah selesai urusan dan ditandatangani menteri PU sekarang," terangnya.

Ia mendorong bupati dan wali kota serta instansi vertikal se-Kalbar secara bersama-sama mengejar target agar penyerapan anggaran optimal.

"Masalah realisasi anggaran perlu disampaikan karena realisasi anggaran di seluruh Indonesia untuk kabupaten belum 50 persen. Paling tinggi 39 persen," ujar Cornelis dalam rapat terbatas dengan instansi vertikal di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Jumat (28/8) pukul 09.00 WIB.

Menurut Cornelis, jika penyerapan anggaran terhambat maka akan berdampak pada ekonomi dan sosial. "Jika anggaran belum terserap optimal maka perputaran uang tidak ada, maka akan muncul pemutusan hubungan kerja, maka yang terjadi pengangguran," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy

Assovie juga pesimistis penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir 2015 ini. Alasan sama juga ia sampaikan yakni PNS takut menjadi PPK dan KPA.

"Saya pesimistis, kalau aparat penegak hukum masih manggil-manggil anak buah saya. Mereka gak mau jadi pejabatnya. Tetapi kalau soal kerja, saya percaya bahwa anak buah saya profesional, tetapi jangan diganggu," ujar Sekda kepada *Tribun* belum lama ini.

Menurutnya, penyerapan belanja langsung saat ini mencapai 26,4 persen. Jika digabungkan dengan belanja tidak langsung mencapai lebih dari 52 persen. Jumlah ini sudah di atas rata-rata.

"Kalau belanja langsung yang sifatnya proyek langsung memang persoalan ada di SKPD teknis. Misalnya masalah kesiapan tendernya, apakah memang ada hambatan di situ," tukasnya.

Selaku Sekda, ia banyak mendapatkan keluhan dari anak buahnya yang tak bersedia menjadi PPK. "Saya selaku Sekda juga banyak mendapatkan keluhan dari anak buah saya yang tidak bersedia menjadi PPK. Karenanya, baru duduk SK seming-

gu sudah dipanggil aparat penegak hukum. Surat kalengpun diproses, jadi orang takutlah," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta komitmen bersama dalam berbangsa dan bernegara, apakah memang mau masing-masing atau bersinergi.

Kalau mau bersinergi, katanya, harus punya pandangan positif. "Orang belum bekerja masak dituduh macam-macam. Makanya kita sepakat adanya undang-undang administrasi pemerintahan. Kalau memang salah secara administratif, sanksi administratif. Kecuali kalau sanksi pidana," jelasnya.

Tetapi sanksi pidana ada di BPK RI dan diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki, kalau sudah lewat 60 hari ada unsur pidana tidak ditindaklanjuti baru kemudian diproses secara pidana.

Imbauan agar para PNS tak takut mengelola anggaran sudah disampaikan Wali Kota Pontianak Sutarmidji belum lama ini.

Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Pontianak tidak takut dalam mengelola anggaran. Meski demikian, pengelolaan anggaran harus memper-

hatikan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"SKPD jangan lagi ada rasa takut dalam mengelola anggaran dan lain sebagainya. Sepanjang penggunaannya tepat dan tidak ada hal-hal yang kongkalikong. Jangan ada yang takut," ujar Midji.

Jika berada pada jalur yang benar serta berdasarkan aturan yang berlaku, lanjutnya, maka tak perlu ada yang ditakutkan. "Orang takut itu kalau memang ada salah. Kita kerja ada pedoman dan aturannya," tuturnya.

Midji mengingatkan dalam pengelolaan anggaran agar serius sehingga tidak menimbulkan dampak hukum ke depannya. "Fokus, cepat selesaikan. Sampaikan ke saya kalau ada hambatan apapun dalam kegiatannya. Segera diberitahu," ungkapnya.

Sejauh ini, penyerapan anggaran APBD Pemkot Pontianak tahun 2015 sudah mencapai 41 persen. "Lumayan, tapi tidak baik. Seharusnya kita di atas 50 persen. Sebenarnya banyak yang bisa direalisasikan, cuma terlalu lama prosesnya," tuturnya. (rul/doi)